

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah kiprah Benny Moerdani dalam militer dan politik Indonesia. Kiprahnya dalam militer dan politik Indonesia sangat menarik untuk dikaji, karirnya dalam militer sangat gemilang dengan merintis karir dari TKR (Tentara Keamanan Rakyat) hingga di tahun 1983 mencapai puncak militernya sebagai Panglima ABRI. Sedangkan karirnya dalam politik di Indonesia dimulai saat tahun 1988 sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Peneliti ingin meneliti tentang kiprahnya karena pertama, peneliti menilai kurangnya kajian khusus mengenai tokoh Benny Moerdani dalam bentuk karya ilmiah baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal. Kedua, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber bagi orang-orang yang menggali informasi mengenai Benny Moerdani. Ketiga, karirnya baik militer ataupun politik dalam sejarah Indonesia dapat menjadi penyambung kronologi sejarah khususnya kajian mengenai Orde Lama maupun Orde Baru.

Dalam peristiwa penyerangan markas Kempetai di Solo, Benny Moerdani ikut terjun dalam kerumunan massa yang akan menyerbu markas Kempetai memegang sepucuk senjata rampasan ikut dalam arus massa yang akan menyerbu markas Kempetai (Puspafirdausi, 2018, hlm. 1). Hal tersebut menjadi titik pijak untuk melangkah dalam jajaran militer. Di usianya yang baru menginjak 13 tahun keberaniannya untuk ikut mempertahankan negara sangat bergejolak. Tidak takut resiko terburuk dari hal yang dia lakukan seperti kematian, sifat keberaniannya yang sudah tertanam sejak usia belasan tahun juga menjadi salah satu sifat khas dari Benny ketika ia menjadi anggota militer.

Karir dalam militernya menarik untuk dikaji karena ketika dalam militer, Benny Moerdani mengarungi berbagai bidang kemiliteran mulai dari pelatih prajurit, intelijen, hingga puncak karirnya sebagai Panglima ABRI. Seperti dikutip dari Pour (2007, hlm. 42). Pada 18 Maret 1953 KKAD (Korps Komando Angkatan Darat) dibentuk, kecerdasan dan semangat militer Benny Moerdani semakin terlihat

Muhamad Satria Nugraha, 2019

KIPRAH LEONARDUS BENNY MOERDANI DALAM MILITER DAN POLITIK INDONESIA TAHUN 1961-1993
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

akhirnya ditugaskan sebagai pelatih bagi para prajurit yang ingin bergabung dengan KKAD (Korps Komando Angkatan Darat) dan diangkat sebagai Kepala Biro Pengajaran.

Benny Moerdani yang masuk dalam jajaran RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) dipanggil untuk pertama kalinya memasuki medan pertempuran yaitu untuk menangani masalah pembebasan Irian Barat tahun 1961. Tahun tersebut menjadi batasan penelitian karena fokus penelitiannya ingin dimulai ketika Benny Moerdani memasuki pertempuran setelah menjadi jajaran militer secara administratif. Meskipun pernah melatih di KKAD, namun sangat terbatas perannya dalam jajaran militer. Hal tersebut dikarenakan ketika melatih para prajurit, hanya fokus dalam menangani pengajaran prajurit sehingga tidak pernah dilibatkan untuk menangani pertempuran-pertempuran. Setelah jabatannya naik sebagai Kepala Biro Pengajaran sosoknya mulai disorot oleh para perwira tinggi militer, di tahun 1956 KKAD berganti menjadi RPKAD tidak lama setelah berganti nama, Benny Moerdani diamanahi jabatan sebagai Komandan Kompi A RPKAD (Puspafirdausi, 2018, hlm. 1).

Perjalanan militer yang sangat beragam diperoleh ketika peristiwa konfrontasi Indonesia – Malaysia, dimulai mendapat panggilan sebagai pasukan khusus menyisir jalur perbatasan Kalimantan dengan Malaysia, lalu menjadi pasukan gerilya untuk menumpas marinir Inggris hingga harus menyamar dan masuk dalam jajaran Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) yang saat itu berjuang juga untuk menumpas marinir Inggris. Bahkan karir intelijennya dimulai dari konfrontasi Indonesia Malaysia setelah bertemu dengan Ali Moertopo di Kostrad dan mengetahui potensi dirinya.

Setelah Indonesia dan Malaysia menyatakan damai melalui jalur diplomasi, Benny Moerdani ditunjuk sebagai Kepala Penghubung Indonesia Malaysia. Prestasinya dalam mengatasi masalah di Malaysia diamati oleh Soeharto sehingga dipercaya untuk berdiplomasi mengurus keamanan antara Indonesia dengan negara lain, sehingga perannya tidak sampai di Malaysia saja, peran diplomatiknya juga

ditunjuk untuk mengawasi perang Vietnam, juga menjadi Konsul Jenderal di Seoul, Korea.

Di tahun 1983 diangkat ke jabatan tertinggi dalam militer yaitu sebagai Panglima ABRI. Kiprahnya dalam militer memiliki banyak jejak setelah peristiwa di Solo tahun 1945, selain menjadi pelatih prajurit juga menerima tugas bagi pengaman integrasi nasional yang dimulai ketika operasi pembebasan Irian Barat, Konfrontasi Indonesia Malaysia, pendudukan Indonesia di Timor Timur, dan peristiwa lainnya.

Dinilai banyak bergelut dalam dunia intelijen dan pasukan khusus hingga ahli dalam telik sandi, pengangkatannya sebagai Panglima ABRI menuai sentimen seakan-akan meloncat dari jabatan intel ke Panglima ABRI (Sitompul, 2018). Tentunya pengangkatan Panglima ABRI tidak dapat terlepas dari kewenangan Kepala Negara seperti dinyatakan dalam Pour (1993, hlm. 454) menurut Soeharto di usianya yang masih muda sudah ikut mencicipi perang kemerdekaan, sehingga diharapkan dapat mengerti serta memahami nilai-nilai kejuangan para perwira militer Angkatan 45. Pilihan tersebut merupakan sebuah cara untuk tetap bisa menjalin kesinambungan alih generasi.

Benny Moerdani pasca lengsernya Soeharto terbebas dari kasus pelanggaran HAM padahal saat menjalani karir militer banyak kelompok yang menilainya sebagai tokoh garang dan anti-Islam terlebih dalam kasus Petrus 1984. Benny Moerdani dipercaya Soeharto untuk menyelesaikan kasus hukum dari masalah premanisme dan korupsi Pertamina. Selain itu, Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 juga menjadi perhatian para pengamat HAM. Saat itu jabatannya adalah Panglima ABRI dan peristiwa berdarah tersebut menjadi tanggung jawabnya. Tentu pandangan khalayak terhadapnya mempunyai kesan buruk terlebih ketika peristiwa Tanjung Priok 1984 yang dinilai seharusnya Benny Moerdani dapat mencegah peristiwa tersebut (Riyanto, 2014). Begitupun pandangan dari Gus Dur yang menyadari bahwa kebanyakan muslim para pemimpin, khususnya kaum modernis, tidak benar-benar percaya Benny Moerdani. Alasan utama untuk ini adalah karena 1984 Insiden Tanjung Priok, di saat Moerdani memerintah (Syarif, 2012, hlm 112).

Ketika berakhir dari jabatan Panglima ABRI lalu Benny Moerdani berkiprah politik menjadi Menhankam. Kiprahnya dalam militer dan politik di Indonesia menjadi keresahan bagi peneliti seperti latar belakang berperan dalam militer dan politik, serta dampak dari kebijakan tersebut bagi keadaan politik nasional. Mempunyai latar belakang militer dalam jiwanya serta mempunyai bekal pengalaman sebagai intel yang pada akhirnya diamanahi sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan juga menjadi ketertarikan peneliti dalam mengkaji perannya dalam politik di Indonesia.

Politik Indonesia pada masa Orde Baru mempunyai karakter tersendiri karena terkenal dengan rezim otoriter yang dipimpin oleh Soeharto (Adam, 2006, hlm. 33). Karakter tersebut menarik peneliti untuk mengkaji mengenai masalah politik di masa Orde Baru. Banyak tindakan represif dilakukan untuk mengamankan stabilitas politik di masa Orde Baru. Salah satunya mengenai masalah diangkatnya Benny Moerdani sebagai Menhankam setelah berani mengkritik Soeharto mengenai kekuasaannya di tahun 1985.

Selama 5 (lima) tahun Benny Moerdani menjabat sebagai Menhankam dari tahun 1988 sampai 1993, menggantikan Menhankam sebelumnya yaitu Poniman. Selama menjadi Menhankam, Benny Moerdani tidak menganggap posisi itu sebagai posisi untuk membatasi ruang gerak seseorang dan bukan posisi yang disebutkan oleh Poniman hanya sebagai jabatan untuk kegiatan seremonial saja (Pour, 1993, hlm. 551). Sebagai Menhankam dia masih ikut memikirkan bagaimana dapat mencetak pemimpin-pemimpin nasional yang tangguh. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari lembaga pendidikan baik ABRI maupun non ABRI. Setelah didiskusikan dibanyak tempat, akhirnya pada pertengahan tahun 1991 dia sampai kesimpulan: Dalam hal ini lembaga yang diajak kerjasama adalah Perguruan Taman Siswa, yang mempunyai pengalaman menyemai nasionalisme Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Sekolah yang dia wujudkan diberi nama sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara dengan gedung-asramanya di Magelang tidak jauh dari kompleks AKMIL (Suwarno, tt, hal. 2). Di sekolah inilah diharapkan pemimpin Indonesia yang dari segi moral, kejuangan, dan jasmaninya dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ketertarikan

peneliti juga muncul karena dapat membantah pandangan negatif itu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan pandangan baik mengenai jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Masa Orde Baru, posisi Menhankam sering dikenal sebagai jabatan untuk menghadiri kegiatan seremonial saja serta dikenal sebagai jabatan untuk mengikis kekuatan politik agar posisi seseorang terkekang kekuatan politiknya. Peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Benny Moerdani sebagai Menhankam karena sebelum menjadi Menhankam, Benny Moerdani merupakan orang yang sangat dipercaya Soeharto. Selain itu, peneliti ingin mencari fakta-fakta mengenai peranannya untuk menjaga stabilitas nasional saat menjadi Menhankam. Peneliti juga tertarik karena karakternya yang dapat tetap patuh kepada tugas serta kewajibannya sebagai Menhankam meskipun banyak dikaitkan dengan isu kudeta dan merongrong posisi Wakil Presiden, tetapi tetap professional dalam mengemban amanahnya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan mempunyai prestasi yang cukup baik untuk menjaga stabilitas nasional, meskipun gagasan-gagasannya sulit diterima oleh khalayak hal ini berakar dari peristiwa Petrus juga peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Banyak petinggi Islam yang menaruh curiga terhadapnya sehingga gagasan yang sulit diterima terlebih Indonesia adalah mayoritas beragama Islam.

Keberanian Benny Moerdani dan tetap teguh pada dharma dalam menjalankan amanahnya sebagai Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) berusaha mencegah keributan dan mengamankan jalannya sidang umum MPR 1988 (Pour, 1993, hlm. 549). Keributan terjadi akibat kisruhnya pencalonan Wakil Presiden dalam sidang MPR 1988. Jabatan sebagai Pangkopkamtib diperolehnya bersamaan sejak diangkat menjadi Panglima ABRI. Pengamanan tersebut murni karena jabatannya sebagai Pangkopkamtib yang bertugas untuk menjaga keamanan jalannya persidangan.

Pada tahun 1988 Soeharto tidak menurunkan Benny Moerdani, tetapi menunjuknya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan seperti keterangan dari

Pour (1993, hlm. 551) tiga minggu setelah sidang umum MPR 1988 pada pengumuman Kabinet Pembangunan V, Soeharto menunjuknya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Selain itu, juga masih menjabat sebagai Pangkopkamtib. Soeharto menganggapnya karena mempunyai kompetensi dalam strategi pertahanan dan keamanan karena berbekal pengalaman sebagai Kopkamtib, BAKIN sesuai dengan penjabaran dari Suwarno (tt, hlm. 2) Benny Moerdani mulai mengatur jalur utama, dalam bidang kemiliteran pada masa itu, yaitu Hankam, Kopkamtib, dan BAKIN. Secara berangsur-angsur Benny Moerdani ditetapkan untuk menjabat sebagai Asisten Intelijen Hankam, sebagai Asisten Intelijen Kopkamtib, dan juga wakil Kepala BAKIN. Sebagai Asisten Intelijen Kopkamtib Benny secara otomatis juga selaku Komandan Satgas Intel yang memiliki kewenangan Kopkamtib yang teramat kuasa. Selain itu juga ditetapkan untuk menjadi Kepala Pusat Intelijen Strategis Hankam.

Reputasi Benny Moerdani di mata Soeharto meningkat pesat-yang selain kecerdikannya dalam menangani masalah intelijen. Lebih dari empat tahun sebelumnya dengan sabar telah mengonsolidasikan semua fungsi intelijen militer di bawah kendalinya di dalam lingkup Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dengan masih merangkapnya dalam beberapa jabatan di intelijen militer, pengaruhnya di Bakin langsung menguat (Elsam, 2014, hlm 9). Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan Soeharto mengangkatnya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Benny Moerdani kehilangan sebagian dari kekuasaannya pada bulan September 1988 dengan dibubarkannya Kopkamtib. Seperti didokumentasikan buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988–11 Maret 1993” ditulis oleh Nazaruddin (2003, hlm. 69-70), berdasarkan Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1988, Presiden Soeharto mendirikan Bakorstanas (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional). Selain itu, dengan Keputusan Presiden No. 253/M/1988, Soeharto pun mengangkat Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno menjadi ketua badan tersebut.

Bakorstanas merupakan lembaga yang cukup gemuk, beranggotakan Sekretaris Menko, Wakil dari Mabes ABRI, Angkatan, Polri, Kejaksaan Agung, dan Bakin. Di tingkat daerah, ada Bakorstanasda yang diketuai oleh Panglima Kodam.

Dibubarkannya Kopkamtib menurut Try Sutrisno sebagai ketua Baskorstanas menjelaskan bahwa Kopkamtib lahir dari situasi khusus yaitu pemberontakan PKI tujuannya untuk pemulihan keamanan dan ketertiban. Kopkamtib berkembang dan akhirnya tidak hanya ditujukan pada PKI saja tetapi juga ekstrem kiri, ekstrem kanan, dan yang tidak segaris dengan Pancasila, serta pengamanan pembangunan (Pour, 1993, hlm. 495).

Kekhawatiran Soeharto kepada Benny Moerdani sangat tinggi terutama karena berani mengkritik masalah kekuasaannya terutama tentang anak-anaknya yang akan ikut campur mengenai pengadaan alat utama sistem senjata militer (Tempo, 2017, hlm. 187). Selain itu kekhawatiran Soeharto juga ditambah oleh banyaknya kabar Benny Moerdani dituduh merencanakan kudeta terhadap Soeharto. Hal ini mendorong Soeharto menjanjikan tindakan keras terhadap siapa saja yang berani menggantikannya secara inkonstitusional. Penjelasan ini sesuai dengan penjabaran dari Pambudi (2009, hlm. 84) dalam perjalanan pulang dari kunjungan kenegaraan ke Beograd, Yugoslavia Soeharto berkata “biar jenderal atau menteri yang bertindak inkonstitusional akan saya gebuk” banyak pandangan bahwa kata-kata itu ditujukan kepada fraksi-fraksi Benny Moerdani yang melancarkan isu suksesi.

Masa-masa Benny Moerdani menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan penuh sekali dengan isu kudeta. Hal itu jelas saja karena disebut-sebut sebagai orang kedua terkuat setelah Soeharto di masa Orde Baru (Harsono, dkk. tt, hlm. 111). Pernyataan tersebut sebenarnya merujuk pada kedekatannya dengan Soeharto, tetapi sekaligus orang yang juga berani mengkritik Soeharto. Kritik tersebut banyak dipandang orang memicu pergeseran kepada posisi Menhankam, sebenarnya hanya ingin melindungi Soeharto dari ancaman politiknya. Selaras dengan pernyataan Duanto (2019) menjelaskan bahwa Benny Moerdani bukan tipe “penjilat” dan suka menjatuhkan orang lain dengan memberikan informasi tidak benar, berprinsip harus bisa menjauhkan Soeharto dari orang-orang yang suka menjilat atau orang yang suka memfitnah demi mendapat perhatiannya.

Posisinya di Menhankam ditujukan agar terkekang kekuasaannya terlebih sudah banyak isu-isu kudeta yang dilayangkan kepadanya. Meskipun banyak isu-isu

tersebut Benny Moerdani tetap tenang sebagai Menhankam dan tetap pada pendiriannya sebagai pengaman stabilitas nasional. Selain itu Benny Moerdani selalu berusaha memprioritaskan profesionalisme, meskipun keberaniannya untuk mengungkapkan keresahannya terhadap Soeharto membuahkan kecurigaan dan keretakan hubungan.

Tujuannya ketika menjadi Menhankam adalah murni untuk menjaga stabilitas nasional dan menjaga kemandirian politik Indonesia serta meredam konflik-konflik yang muncul baik dari internal maupun eksternal. Posisinya sebagai Menhankam pada saat Orde Baru justru dikenal sebagai posisi agar peran seseorang tidak mengganggu kekuasaan politik hingga “hilang taringnya”. Berbeda dengannya yang memanfaatkan posisinya sebagai Menhankam, sejak penyerahan jabatannya Benny Moerdani berpendapat bahwa organisasi Departemen Pertahanan Keamanan dan organisasi ABRI mempunyai ciri khas karena tugasnya sama-sama untuk membina kekuatan pertahanan keamanan Negara dan sama-sama bertanggung jawab kepada Presiden (Pour, 2007, hlm. 114).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan utama yang menjadi bagian penting dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Leonardus Benny Moerdani berperan dalam dunia Militer dan Politik di Indonesia 1961-1993?” Adapun rumusan pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang Benny Moerdani berperan dalam militer dan politik Indonesia?
2. Bagaimana sepak terjang Benny Moerdani dalam pertempuran militer di tahun 1961-1988?
3. Bagaimana strategi politik Benny Moerdani untuk menjaga pertahanan dan keamanan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangan terhadap

penelitian sejarah nasional Indonesia. Tujuan khusus penelitian ini yaitu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti, yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan latar belakang Benny Moerdani berperan dalam militer dan politik Indonesia yang meliputi; karir Benny Moerdani sebelum masuk dalam militer serta titik pijak Benny Moerdani berperan dalam politik di Indonesia.
2. Menganalisis sepak terjang Benny Moerdani dalam menghadapi pertempuran militer di tahun 1961-1988 yang meliputi; strategi militer yang ditempuh dalam setiap pertempuran, serta dampak dari strategi militer yang diterapkan.
3. Menguraikan strategi politik Benny Moerdani untuk menjaga pertahanan dan keamanan di Indonesia yang meliputi; kebijakan yang diterapkannya, serta dampak dari kebijakannya bagi situasi politik di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Manfaat Akademis

1. Menambah wawasan keilmuan tentang sejarah Orde Baru
2. Mengembangkan penulisan-penulisan sebelumnya yang berkaitan dengan militer dan politik Indonesia.
3. Menjadi referensi selanjutnya bagi para penulis-penulis yang akan meneliti permasalahan yang serupa.

Manfaat Praksis

1. Mendeskripsikan kiprah Benny Moerdani dalam militer dan politik Indonesia tahun 1961-1993
2. Mengembangkan penelitian tentang militer dan politik Indonesia masa Orde Baru

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Untuk memudahkan memahami penulisan ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hal-hal dasar dalam kepenulisan skripsi. Hal-hal yang akan dimuat dalam pendahuluan ini diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan struktur organisasi skripsi. Hal yang menjadi dasar dari kepenulisan tentunya

Muhamad Satria Nugraha, 2019

KIPRAH LEONARDUS BENNY MOERDANI DALAM MILITER DAN POLITIK INDONESIA TAHUN 1961-1993
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

akan dimuat banyak pada latar belakang penulisan. Pada subbab latar belakang akan dipaparkan latar belakang penulis menyusun skripsi tentang *Leonardus Benny Moerdani Peran dalam Dunia Militer dan Politik di Indonesia 1961-1993* ini. Kemudian pada subbab rumusan masalah yang diidentifikasi beberapa poin permasalahan yang harus diselesaikan oleh penulis dan menjadi batasan materi yang akan dikaji dalam skripsi. Setelah mengidentifikasi masalah apa saja yang akan dibahas penulis akan memaparkan tujuan dan manfaatnya. Dari tujuan dan manfaat inilah penulis bisa mengungkapkan alasan dasar dari kepenulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi tentang konsep dan teori yang dipakai pada penulisan peneliti. Perlu adanya beberapa konsep yang mendasari penulisan yang akan ditulis. Sehingga peneliti bisa mengarahkan penulisannya lebih struktur / sistematis. Peneliti akan menguraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan tema penulisan. Kemudian teori mana yang menunjang penulisan peneliti, sehingga penulisan tetap pada rel yang baku. Terakhir dalam kajian pustaka ini akan dipaparkan juga penulisan terdahulu yang menjadi rujukan utama peneliti dalam penulisan.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas langkah-langkah metode dan teknik penulisan yang peneliti gunakan dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, serta analisis dan cara penulisannya. Metode yang digunakan adalah metode historis. Tahapan-tahapan metodenya adalah sebagai berikut: memilih suatu topik yang sesuai, mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik, membuat catatan tentang apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditentukan ketika penulisan sedang berlangsung, mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik sumber), menyusun hasil-hasil penulisan (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya, dan menyajikannya dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti sejelas mungkin.

Bab IV Pembahasan. Bab ini merupakan uraian pembahasan mengenai *Leonardus Benny Moerdani Peran dalam Dunia Militer dan Politik di Indonesia*

Muhamad Satria Nugraha, 2019

KIPRAH LEONARDUS BENNY MOERDANI DALAM MILITER DAN POLITIK INDONESIA TAHUN 1961-1993

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1961-1993 ini. Peneliti akan memaparkan juga secara jelas jawaban dari rumusan masalah yang diajukan pada bab 1 sebelumnya yakni latar belakang Benny Moerdani dapat terlibat dalam politik Indonesia, kebijakan-kebijakan yang dilakukannya selama menjadi Menhankam, serta dampak dari kebijakan-kebijakan bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, pada bab ini peneliti mengemukakan kesimpulan terhadap beberapa permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. Hal ini tentunya dilakukan setelah peneliti menemukan semua fakta yang ada dengan didukung oleh berbagai literatur yang telah dibaca dan didiskusikan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang intinya memberikan rekomendasi terhadap pembelajaran sejarah di sekolah dan dari hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk penulisan selanjutnya.